KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-69
	TANGGAL PEMBUATAN	**24 JUNI 2025**
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PEMBUKAAN REKENING *VIRTUAL ACCOUNT* SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 5 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 10 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2 Memahami peraturan terkait penatausahaan rekening giro satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum 3 Mempunyai kemampuan penelaahan dan penyelesaian permasalahan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka proses pelaporan rekening pemerintah tidak tepat dan menghambat data laporan keuangan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUKAAN REKENING *VIRTUAL ACCOUNT* SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		SATUAN KERJA	BIRO KEUANGAN	UKE I	KPPN MITRA UKE I	BANK UMUM	KEMENTERIAN KEUANGAN (DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Satuan Kerja mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening Virtual Account (VA) kepada Eselon I	MULAI						Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	1 Hari Kerja	Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	
2	Unit Eselon I menyampaikan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening VA Satuan Kerja kepada KPPN Mitra Kerja Unit Eselon I							Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	1 Hari Kerja	Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	
3	KPPN Mitra Kerja Unit Eselon I menerbitkan Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening yang akan disampaikan kepada Bank Umum dan ditembuskan kepada Eselon I							Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	5 Hari Kerja	Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	
4	Bank Umum menerbitkan User Dashboard, CMS, kartu debit, token dan informasi rekening Satker							Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	10 Hari Kerja	User Dashboard, CMS, kartu debit dan informasi Rekening Satker	
5	Satuan Kerja menerima dan melakukan perekaman persetujuan pembukaan rekening VA melalui aplikasi SPRINT							Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja serta kelengkapan *tools* VA	1 Hari Kerja	Approval Pembukaan Rekening pada aplikasi SPRINT	
6	Satuan Kerja melaporkan pembukaan Rekening kepada Biro Keuangan dalam rangka penatausahaan rekening pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum							Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja dan Hasil Tangkapan Layar *Approval* Pembukaan Rekening pada Aplikasi SPRINT	1 Hari Kerja	Dokumen Pembukaan Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum	
7	Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi rekening pemerintah dengan Kementerian Keuangan						SELESAI	Laporan Rekonsiliasi Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum	1 Hari Kerja	Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup K/L	